

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN UMUM DAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI*IMPLEMENTATION OF GENERAL EDUCATION AND CHARACTER EDUCATION POLICIES IN HIGHER EDUCATION***Agil Nanggala*, Dadang Sundawa**Program Studi Doktor Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 13 Juni 2023

Disetujui : 11 September 2023

Keywords:

character education; compulsory curriculum courses; universities

Kata Kunci:

pendidikan karakter; mata kuliah wajib kurikulum; perguruan tinggi

***) Korespondensi:**E-mail: agilnanggala@upi.edu

Abstract: this study aims to analyze the implementation of general education and character policies in universities and the urgency of establishing general education and character study programs for universities. This study uses a qualitative approach with literature study techniques. The implementation of general education and character policies in higher education can be carried out by the technical implementation unit of compulsory curriculum courses and carried out in the form of study programs that specifically overshadow general education and character. The urgency of establishing a general education and character study program for universities is related to strengthening the superior character of students as well as strengthening institutional identity, especially for educational institutions of education personnel that have the status of state universities as legal entities.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan umum dan karakter pada perguruan tinggi serta urgensi pembentukan program studi pendidikan umum dan karakter bagi perguruan tinggi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur. Implementasi kebijakan pendidikan umum dan karakter pada perguruan tinggi dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis mata kuliah wajib kurikulum serta dilaksanakan dalam bentuk program studi yang secara khusus menaungi pendidikan umum dan karakter. Urgensi pembentukan program studi pendidikan umum dan karakter bagi perguruan tinggi berkaitan dengan penguatan karakter unggul mahasiswa sekaligus penguatan identitas kelembagaan terutama bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi menjadi sarana yang strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia Indonesia. Perguruan tinggi mengemban misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara muda yang beradab. Upaya untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas tidak hanya dilakukan terbatas pada aspek keterampilan saja, tetapi juga harus memuat upaya peningkatan kualitas pengetahuan sekaligus karakter warga

negara. Hal ini dilakukan untuk membentuk warga negara yang dapat diandalkan oleh negara terutama untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Warga negara berkarakter merupakan modal sosial yang dapat membawa bangsa Indonesia menuju puncak peradaban yang agung. Upaya penguatan karakter dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, informal, dan non formal (Risda, 2022). Pengelolaan sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mendukung kemajuan suatu negara. Tantangan untuk menjadi bangsa yang maju harus disikapi dengan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perguruan tinggi harus memiliki kesadaran untuk memperkuat karakter mahasiswa yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan bonus demografi. Indonesia diprediksi menjadi pusat ekonomi terkuat kelima pada tahun 2045 karena menyokong 38% dari total penduduk produktif di ASEAN (Kemdikbud, 2017). Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara yang berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Prediksi tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan upaya penguatan karakter generasi muda agar dapat menjadi warga global yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku. Langkah konkrit yang dapat dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan karakter pada perguruan tinggi. Penguatan karakter tidak dapat diabaikan karena telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan bersifat dinamis karena adanya modernisasi dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks.

Mahasiswa pada jenjang Strata I rata-rata berusia 18-24 tahun yang termasuk dalam kategori usia produktif. Potensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa harus dikelola dengan baik untuk membentuk kepribadian yang kritis, kreatif, dan inovatif (Paramita, 2010). Hal ini selaras dengan visi pendidikan karakter yang dikembangkan di Universitas Pendidikan Indonesia yaitu membentuk karakter mahasiswa yang Pancasilais. Eksistensi pendidikan karakter di Universitas Pendidikan Indonesia tidak sebatas unit pelaksana teknis Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), tetapi telah menjadi program studi untuk jenjang Magister dan Doktor. Program studi Pendidikan Umum dan Karakter mengemban misi untuk membentuk lulusan yang memiliki karakter Pancasila secara holistik sekaligus memiliki wawasan tentang pendidikan umum yang mumpuni (Faiz, 2020). Pendidikan karakter perlu diselenggarakan pada setiap perguruan tinggi membentuk warga negara muda yang beradab (*civic virtue*), sebagai modal sosial dalam mewujudkan *civil society*.

Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi harus memuat mata kuliah umum yang berbasis penguatan karakter diantaranya yaitu agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan. Bentuk penguatan karakter pada masing-masing perguruan tinggi memiliki karakteristik yang

berbeda satu sama lain, ada yang dilaksanakan melalui program studi khusus atau diselenggarakan oleh suatu unit pelaksana teknis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola dan mengembangkan kelebagaannya. Penyelenggaraan pendidikan umum harus diimbangi dengan pendidikan karakter karena pada dasarnya pendidikan umum bertujuan agar manusia dapat hidup layaknya seorang manusia (Purwanti, Rizal, & Nurdin, 2020). Pendidikan umum dan pendidikan karakter harus dilaksanakan secara holistik dan substantif.

Penyelenggaraan pendidikan umum berbasis MKWK pada perguruan tinggi merupakan upaya penguatan karakter mahasiswa secara tersirat yang terbatas pada unit pelaksana teknis. Hal ini berdampak pada identitas kelembagaan perguruan tinggi yang belum secara tersurat memuat urgensi pendidikan karakter melalui pendidikan umum, khususnya pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Penerapan otonomi memungkinkan setiap perguruan tinggi untuk menempatkan pendidikan umum sebagai salah satu program studi dalam upaya pembentukan identitas kelembagaan perguruan tinggi LPTK. Perguruan tinggi minimal tidak menghilangkan eksistensi pendidikan umum dan pendidikan karakter melalui pembelajaran MKWK. Kebijakan yang dibuat untuk jenjang pendidikan tinggi harus didasarkan pada upaya pembentukan karakter mahasiswa yang bijaksana, disiplin, jujur, dan berkomitmen (Siregar, Sahirah, & Harahap, 2020). Perguruan tinggi dapat melakukan inovasi sekaligus eksplorasi terhadap tujuan, konsep, metode, dan praktik pembelajaran pendidikan umum dan pendidikan karakter agar selaras dengan orientasi pendidikan nasional yang diatur dalam konstitusi.

Penyelenggaraan MKWK menjadi bukti eksistensinya pendidikan umum di jenjang pendidikan tinggi, baik LPTK maupun umum, dengan visi, konsep, dan praktik yang berbeda berbeda satu sama lain. Pendidikan umum di perguruan tinggi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa. Pendidikan umum sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter mahasiswa yang kritis, komunikatif, dan solutif ketika dihadapkan pada suatu permasalahan. Upaya pembentukan karakter mahasiswa menjadi tantangan bagi

setiap perguruan tinggi, terlebih harus dilakukan secara harmonis, kolaboratif, dan berkelanjutan. MKWK merupakan kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan karakter mahasiswa pada ranah spiritual, intelektual, emosional, dan sosial agar dapat menjadi warga negara seutuhnya (Rahim, 2018). MKWK yang mengintegrasikan pendidikan umum sekaligus pendidikan karakter dipandang sebagai landasan dalam upaya penguatan identitas kelembagaan dari suatu perguruan tinggi.

Implementasi pendidikan umum dan pendidikan karakter di perguruan tinggi perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui hambatan, potensi, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Upaya pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi LPTK dapat dilakukan dengan menjadikan pendidikan umum dan karakter sebagai salah satu program studi. Hal ini secara tidak langsung dapat mendukung adanya riset dan pengabdian pada masyarakat berbasis kolaborasi antar perguruan tinggi sekaligus memberikan penegasan mengenai unit kerja di perguruan tinggi yang menjadi penanggung jawab utama dalam penguatan karakter Pancasila. Kebijakan dan kurikulum pendidikan umum tidak dapat dilepaskan dari penguatan karakter warga negara muda, karena pada dasarnya pendidikan umum memiliki visi untuk membentuk warga negara yang cerdas dan beradab (Shih, 2019). Perguruan tinggi yang memiliki program studi khusus untuk pendidikan umum dan pendidikan karakter secara tidak langsung telah memperkuat identitas kelembagaan yang dimiliki. Hal ini dapat mendukung pengembangan disiplin ilmu pendidikan, kolaborasi, inovasi, sekaligus mempersiapkan mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang dicita-citakan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian ini membahas tentang implementasi kebijakan pendidikan umum dan karakter pada perguruan tinggi serta urgensi pembentukan program studi pendidikan umum dan karakter bagi perguruan tinggi.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur. Penelitian kualitatif bersifat mendalam, elaboratif, dan partisipatif sehingga dapat digunakan untuk menganalisis konsep pendidikan umum dan

karakter di perguruan tinggi sebagai penguatan identitas kelembagaan LPTK sekaligus penguatan karakter mahasiswa unggul. Kajian ini terfokus pada konsep pendidikan umum dan karakter di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai satu-satunya LPTK di Indonesia yang memiliki Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu artikel jurnal karena memiliki keabsahan yang tinggi. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku dan dokumen untuk meminimalisir adanya kesalahan riset yang bersifat konseptual, prosedural, dan praktis. Analisis data dalam kajian ini dilakukan secara interaktif dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis data menjadi hasil atau jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan Umum dan Karakter pada Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi berperan penting dalam persiapan menuju bonus demografi, khususnya dalam memperkuat karakter unggul generasi muda. Perguruan tinggi harus melakukan upaya untuk memperkuat identitas kelembagaannya secara tersurat, agar dapat mempermudah pengembangan pada ranah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Optimalisasi otonomi perguruan tinggi telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki karena pada hakikatnya setiap perguruan tinggi mempunyai ciri khas atau keunikannya masing-masing terutama dalam hal transformasi karakter pada mahasiswa. Penguatan karakter mahasiswa adalah kewajiban bagi setiap perguruan tinggi melalui mata kuliah wajib seperti pendidikan kewarganegaraan, agar generasi muda Indonesia memiliki nilai, moral, dan karakter yang selaras dengan Pancasila (Dewi, Suresman, & Mustikasari, 2020). Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan MKWK yang mencakup mata kuliah agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan.

Perguruan tinggi harus menempatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Hal ini menjadi modal sosial dalam penguatan identitas kelembagaan yang proaktif pada bidang karakter. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan umum dan karakter di perguruan tinggi LPTK masih sangat minim, karena sebatas diterapkan oleh unit pelaksana teknis. Realitas tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri dalam penguatan identitas kelembagaan dan penguatan karakter unggul mahasiswa, terlebih tidak diwajibkan oleh konstitusi. Implementasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pembelajaran wajib di perguruan tinggi belum dilaksanakan secara optimal karena kualifikasi pendidik yang tidak sesuai dengan bidang sehingga menimbulkan pembelajaran yang sebatas seremonial (Widiatmaka, 2016). Penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi dihadapkan pada berbagai macam persoalan salah satu diantaranya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang hanya dipandang sebagai penggugur kewajiban semata (Supriyanto, 2020). Permasalahan tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan refleksi dalam upaya penyelenggaraan pendidikan karakter di perguruan tinggi.

Praktik pembelajaran MKWK yang belum optimal menunjukkan bahwa perguruan tinggi khususnya LPTK belum sepenuhnya peduli terhadap penguatan karakter unggul mahasiswa. Penguatan karakter Pancasila pada mahasiswa perlu dilakukan secara komprehensif dan representatif melalui transformasi *civic knowledge*, *civic skills*, serta *civic disposition* untuk mewujudkan *civic virtue*. Pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk warga negara yang beradab sekaligus memiliki sikap patriotisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan oleh negara (Dahliyana, Rizal, & Nurdin, 2020). Hal ini menegaskan bahwa eksistensi lembaga atau unit kerja yang berwenang untuk merealisasikan pendidikan karakter harus diperkuat agar upaya penguatan karakter mahasiswa dapat terlaksana secara holistik dan substantif. Optimalisasi pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan pembentukan program studi khusus untuk pendidikan umum dan karakter, sehingga tidak hanya sebatas unit pelaksana teknis.

Diskursus mengenai perubahan unit pelaksana teknis pembelajaran MKWK menjadi program studi pendidikan umum dan karakter timbul karena adanya tantangan dan hambatan dalam penguatan karakter mahasiswa yang semakin kompleks akibat globalisasi. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum menegaskan bahwa pendidikan umum seperti agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan perlu diselenggarakan oleh program studi yang relevan. Penguatan karakter perlu diintegrasikan dalam proses pendidikan secara profesional dan bijaksana untuk membentuk manusia yang humanis dan peka sosial (Berkowitz, 2022). Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 menyebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) atau Mata Kuliah Umum (MKU) menjadi Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK). Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan harmonisasi dalam penguatan karakter, termasuk pemberdayaan unit pelaksana teknis pembelajaran MKWK agar dapat menjadi institusi yang lebih berwenang.

Universitas Pendidikan Indonesia yang berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) menjadi satu-satunya LPTK yang memiliki program studi pendidikan umum dan karakter. Pembentukan program studi pendidikan umum dan karakter di Universitas Pendidikan Indonesia telah mampu meningkatkan pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Program studi pendidikan umum dan karakter hanya tersedia pada jenjang Magister dan Doktor, sedangkan jenjang Sarjana masih terbatas pada program studi pendidikan umum yang belum mencantumkan pendidikan karakter dalam nomenklaturinya. Perbedaan strategi dalam menerapkan pendidikan karakter di setiap perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh mutu, visi, dan misi dari masing-masing institusi. Visi dari program studi pendidikan umum dan karakter di Universitas Pendidikan Indonesia yaitu menjadi pelopor dan unggul dalam penyelenggaraan pendidikan umum dan karakter di Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yaitu sebagai mitra, fasilitator, penyedia keuangan, serta sebagai pihak yang

berwenang untuk memberikan pelayanan dan pendampingan pada perguruan tinggi (Astawa, 2017). Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter tidak hanya ditentukan oleh perguruan tinggi, tetapi juga turut melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Kolaborasi antar perguruan tinggi LPTK sangat diperlukan untuk mewujudkan harmonisasi dalam pembinaan karakter yang mengarah pada demokratisasi pendidikan umum yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perguruan tinggi harus konsisten untuk berinovasi pada ilmu dan pengetahuan sekaligus kebijakan yang berdampak nyata bagi kemajuan pendidikan nasional (Naz & Murad, 2017). Unit pelaksana teknis pendidikan umum perlu memandang penting implementasi pembelajaran MKWK dengan menerapkan model *problem based learning*, *project based learning*, dan *community service learning*. Pembelajaran berbasis masalah dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berdampak nyata bagi mahasiswa (Harahap, Murdiono, & Siagian, 2022). Pendidikan umum wajib diberikan terhadap setiap mahasiswa secara inklusif sebagai langkah konkrit dalam transformasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Optimalisasi pendidikan umum untuk penguatan karakter dapat memperkuat identitas perguruan tinggi sebagai institusi yang peduli pada kualitas generasi muda Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan umum perlu dilaksanakan secara profesional, komprehensif, berkualitas, dan inovatif agar berdampak positif terhadap perkembangan karakter mahasiswa (Hidayah, Ulfah, & Suyitno, 2019). Penyelenggaraan pendidikan umum dan karakter harus sesuai dengan orientasi pendidikan nasional.

Pengembangan kurikulum menjadi salah satu strategi efektif untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Pendidikan karakter menjadi salah satu aspek yang sangat penting mengingat saat ini telah terjadi modernisasi di berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan timbulnya permasalahan mulai dari penyimpangan sosial hingga kriminalitas. Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa setiap program studi pada perguruan tinggi berhak menyusun, merealisasikan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum

yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional, institusional, dan kurikuler. Kurikulum pendidikan harus mengakomodir penguatan karakter karena pendidikan pada dasarnya tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan tetapi mencakup karakter dan keterampilan (Pike, dkk., 2020). Pengembangan kurikulum perlu dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada aspek teoritis dan praktis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing institusi.

Muatan kurikulum pendidikan umum yang relevan, bermutu, dan konstruktif menjadi modal akademik dalam upaya pembentukan karakter mahasiswa melalui pembelajaran MKWK. Pengembangan kurikulum pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi empat tingkatan yaitu kurikulum makro atau nasional, kurikulum institusi atau lembaga pendidikan, kurikulum mata pelajaran atau mata kuliah atau bidang studi, serta kurikulum pembelajaran di dalam kelas (Fajri, 2019). Perguruan tinggi berwenang dalam merealisasikan pendidikan karakter berbasis inovasi, program khas institusi, serta aktivitas kokurikuler dan ekstrakurikuler termasuk pengembangan pendidikan umum sebagai wahana pendidikan karakter (Hasanah, 2013). Kurikulum program studi pendidikan umum dan karakter di Universitas Pendidikan Indonesia memuat ketentuan untuk melaksanakan *community service learning*, *project citizen*, pembelajaran kontekstual dan digital, tugas artikel jurnal, dan seminar atau kolokium dalam proses pembelajaran. Penerapan MKWK dalam bentuk program studi pendidikan umum dan karakter akan mempermudah upaya pengembangan kurikulum, karena institusi telah diberi kewenangan oleh konstitusi. Penerapan MKWK melalui unit pelaksana teknis akan sedikit terhambat karena pengembangan kurikulum dilaksanakan secara birokratik atas persetujuan direktorat akademik.

Perguruan tinggi LPTK memiliki tantangan tersendiri dalam menyusun dan merealisasikan pembelajaran MKWK sebagai pendidikan umum dalam upaya penguatan karakter mahasiswa. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan, kapasitas, dan kapabilitas dari institusi yang bersangkutan. Tantangan yang dimaksud berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, fasilitas yang tersedia, sekaligus atensi dari mahasiswa. Tantangan klasik bagi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan umum diantaranya yaitu dosen

pengampu tidak berkompeten pada bidangnya karena latar belakang akademik yang tidak relevan, pelaksanaan bersifat prosedural dan pragmatis, serta fokus penyelenggaraan yang tidak konsisten terhadap penguatan karakter (Robby, 2020a). Upaya mewujudkan harmonisasi penguatan karakter mahasiswa melalui pendidikan umum hanya sebatas wacana apabila belum dipandang penting oleh setiap perguruan tinggi LPTK. Implementasi pendidikan umum dan karakter di tingkat perguruan tinggi harus dilaksanakan secara adaptif, komprehensif, progresif, dan inovatif.

Urgensi Pembentukan Program Studi Pendidikan Umum dan Karakter bagi Perguruan Tinggi

Pendidikan umum dan karakter menjadi salah satu program yang wajib diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib membentuk karakter mahasiswa yang berlandaskan pada Pancasila. Mata kuliah wajib yang meliputi agama, Pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan menjadi sarana strategis untuk melaksanakan pendidikan karakter bagi mahasiswa. Lembaga yang menyelenggarakan mata kuliah wajib harus diberikan kewenangan penuh dalam mengembangkan konsep pendidikan umum dan karakter yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa (Robby, 2020b). Penyelenggaraan pendidikan umum dan karakter menjadi upaya nyata untuk memperkuat karakter mahasiswa berbasis nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan umum dan karakter dimaksudkan untuk memantik kesadaran dari setiap perguruan tinggi akan pentingnya realisasi pendidikan karakter berbasis pendidikan umum. Orientasi pendidikan karakter tidak membentuk manusia untuk menjadi alat produksi berbasis kapitalis, tidak juga berbasis doktrin untuk melanggengkan kekuasaan layaknya komunis, tetapi orientasinya adalah untuk memanusiasikan manusia secara utuh (Tyas, Sunatro, & Naibaho, 2020). Penyelenggaraan pendidikan umum dan karakter bertujuan untuk mewujudkan karakter unggul mahasiswa agar mampu berpartisipasi dalam mengatasi persoalan sosial di masyarakat sekaligus berkomitmen

bahwa Indonesia yang pluralis secara agama dan multikultur secara budaya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Penyelenggaraan pendidikan umum perlu mengakomodir upaya penguatan karakter unggul mahasiswa berbasis nilai-nilai Pancasila untuk membentuk generasi muda yang selaras dengan kepribadian bangsa. Data *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan bahwa daya saing Indonesia berada pada posisi ke-50 dari total 141 negara, masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand (World Economic Forum, 2019). Pendidikan umum dan karakter pada hakikatnya dimaksudkan untuk memperkuat daya saing Indonesia secara global, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada penguatan kompetensi kewarganegaraan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila setiap perguruan tinggi khususnya LPTK memberikan kewenangan lebih kepada unit pelaksana teknis untuk melakukan transformasi menjadi program studi yang secara khusus menaungi pendidikan umum dan karakter. Penyelenggaraan pendidikan karakter harus didukung secara penuh agar unit pelaksana teknis dapat mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Kurniawati & Nadeak, 2021). Perubahan ini tentu berdampak pada peningkatan kebutuhan keuangan untuk operasional.

Program studi pendidikan umum dan karakter memiliki kewenangan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis penguatan karakter yang sesuai dengan tuntutan modernisasi, digitalisasi, dan kolaborasi. Hal ini dapat direalisasikan dengan melaksanakan pendidikan karakter untuk memperkuat kompetensi kewarganegaraan agar mampu berdaya saing secara global. Kompetensi kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai arah untuk mengembangkan pendidikan karakter karena memuat beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Kompetensi kewarganegaraan menurut Branson dikategorikan menjadi tiga yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* (Lonto, 2019). *Civic knowledge* bertujuan untuk membentuk warga negara yang berpengetahuan dan berwawasan, *civic skills* membentuk warga negara yang terampil dan ahli, serta *civic disposition* dapat membentuk warga negara berkarakter dan berwatak.

Civic knowledge mengarah pada pengetahuan dan wawasan yang harus dimiliki oleh seorang warga negara. Orientasi, konsep, serta praktik pendidikan karakter sebagai pendidikan umum harus mengakomodir penguatan *civic knowledge* untuk membentuk karakter yang unggul dalam diri mahasiswa. Sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berwatak terbentuk melalui wawasan dan pengetahuan yang berkualitas. Program studi pendidikan umum dan karakter harus memiliki visi, materi, strategi, serta model pembelajaran yang utuh dan modern (Ahmadi, 2015). Wacana Indonesia emas tahun 2045 dapat terwujud apabila memperoleh dukungan berbagai pihak, terutama perguruan tinggi yang mengemban misi *Tridharma* yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat (Abi, 2017). Pendidikan karakter yang dikemas dalam pendidikan umum menjadi landasan bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang bermutu.

Civic skills berfokus pada keterampilan atau keahlian yang harus dimiliki oleh mahasiswa agar mampu bertahan di era globalisasi yang semakin terbuka dan dinamis. Modernisasi menuntut mahasiswa untuk menguasai berbagai keterampilan yang dapat mempermudah dalam penyelesaian suatu persoalan. Program studi pendidikan umum dan karakter perlu mengakomodir upaya penguatan terhadap keterampilan mahasiswa yang terintegrasi dengan model pembelajaran modern. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Keterampilan yang harus dikembangkan oleh program studi pendidikan umum dan karakter tidak hanya terbatas untuk berkompetisi di era digitalisasi, tetapi juga agar mampu berkolaborasi di era globalisasi. *Civic skills* atau keterampilan warga negara yang harus dimiliki oleh mahasiswa diantaranya yaitu komunikatif, inovatif, kolaboratif, adaptif, kreatif, berjiwa kepemimpinan, serta keterampilan membaca situasi sekaligus mengambil keputusan secara bijak (Dias & Soares, 2017). Keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan yaitu berkaitan dengan bidang keagamaan, kebangsaan, dan kebahasaan agar mahasiswa tidak melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Civic disposition adalah karakter atau watak yang harus dimiliki oleh mahasiswa agar dapat menjadi seorang warga negara yang baik atau *good citizenship*. Pendidikan karakter dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendidikan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang dipertegas melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020. Penguatan karakter mahasiswa harus terintegrasi pada muatan kurikulum, model, dan praktik pembelajaran khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter dan pendidikan umum (Kabatah, 2021). Penguatan karakter secara holistik tidak akan terlaksana secara optimal apabila tidak diintegrasikan dalam pendidikan dan pembelajaran. Pembentukan program studi pendidikan umum dan karakter sangat membantu dalam upaya penguatan karakter mahasiswa.

Penguatan karakter mahasiswa yang didasarkan pada kompetensi kewarganegaraan mencakup *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan umum dan karakter di tingkat perguruan tinggi. Program studi pendidikan umum dan karakter membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, akademisi, komunitas, swasta, dan media agar misi yang telah direncanakan dapat diwujudkan. Penguatan karakter mahasiswa dapat dilaksanakan melalui program kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang didasarkan pada tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional.

Kurikulum pendidikan umum dan karakter di perguruan tinggi perlu memuat kompetensi kewarganegaraan sebagai orientasi karakter unggul berbasis nilai-nilai Pancasila. Kompetensi kewarganegaraan yang bersifat holistik akan mempermudah upaya evaluasi terhadap pendidikan umum dan karakter yang telah dilaksanakan. Orientasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diajukan oleh lembaga *Center for Civic Education* pada tahun 1999, sebagai representasi *National Standard for Civics and Government*, mengarah pada penguatan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* (Raharja, dkk., 2017). Realisasi pendidikan karakter sebagai pendidikan umum tidak boleh hanya sebatas seremonial saja. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan umum dan

karakter di perguruan tinggi menjadi lebih bermakna dan berdampak nyata bagi penguatan karakter unggul mahasiswa.

Pendidikan umum untuk penguatan karakter unggul berbasis nilai-nilai Pancasila tidak terbatas pada kalangan mahasiswa saja tetapi juga masyarakat sebagai komunitas sosial yang menjadi sasaran program pengabdian. Pendidikan umum untuk penguatan karakter masyarakat dapat dilakukan melalui *community service learning* sebagai upaya untuk membentuk lingkungan masyarakat yang beradab. *Community service learning* mencerminkan konsep pembelajaran yang holistik, visioner, empiris, dan kolaboratif untuk memperkuat karakter unggul mahasiswa seperti aktif, kolaboratif, komunikatif, dan memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat (Jerome, 2012). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk merealisasikan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, memperkuat karakter demokratis, serta yang tidak kalah penting yaitu meleak teknologi.

Program studi pendidikan umum dan karakter harus menjamin kebijakan pembelajaran yang tidak terbatas pada aspek teoritis tetapi juga pembelajaran praktis di luar kelas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan umum dan karakter di perguruan tinggi menjadi salah satu upaya strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang seutuhnya (Gordon & Whichurch, 2007). Otonomi perguruan tinggi LPTK harus dioptimalkan untuk memperkuat karakter unggul mahasiswa. Transformasi unit pelaksana teknis pembelajaran MKWK menjadi program studi pendidikan umum dan karakter sangat dibutuhkan agar pengembangan dan inovasi pembelajaran dapat terwujud. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan stigma bahwa pembelajaran MKWK hanya sebatas penggugur kewajiban.

Program studi pendidikan umum dan karakter memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat karena berkaitan dengan pembentukan karakter unggul mahasiswa berbasis nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter membutuhkan proses yang panjang karena membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian yang profesional dan berkelanjutan (Yuniningsih, Darmi, & Sulandari, 2019). Tantangan yang

dihadapi oleh perguruan tinggi saat ini yaitu berkaitan dengan digitalisasi, kualifikasi dosen, atensi mahasiswa, adaptasi dan inovasi ilmu pengetahuan, pengelolaan isu yang bersifat aktual, konsisten terhadap pengembangan institusi, serta inovasi *service learning* (Cheung, 2012). Hal ini menjadi landasan rasional dan moral bagi LPTK terlebih yang berstatus PTN BH untuk mengembangkan unit pelaksana teknis menjadi program studi pendidikan umum dan karakter sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat karakter mahasiswa.

Rencana aksi untuk mengubah unit pelaksana teknis pendidikan karakter menjadi program studi pendidikan umum dan karakter bagi perguruan tinggi LPTK menjadi narasi yang harus diwujudkan. Penyelenggaraan pendidikan umum yang memuat upaya penguatan karakter mahasiswa secara inklusif dan tersurat akan memperkuat citra sekaligus identitas perguruan tinggi LPTK sebagai lembaga profesional yang peduli terhadap penguatan karakter mahasiswa berbasis nilai-nilai Pancasila. Narasi ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang diperkuat dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan pendidikan umum dan karakter di tingkat perguruan tinggi harus dilaksanakan secara optimal dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan diri menuju bonus demografi.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan umum dan karakter pada perguruan tinggi dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis mata kuliah wajib kurikulum serta dilaksanakan dalam bentuk program studi yang secara khusus menaungi pendidikan umum dan karakter. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan umum dan karakter di perguruan tinggi yaitu dengan melakukan transformasi lembaga yang berwenang dari unit pelaksana teknis menjadi program studi yang berdiri sendiri. Urgensi pembentukan program studi pendidikan umum dan karakter bagi perguruan tinggi berkaitan dengan penguatan identitas kelembagaan sekaligus penguatan karakter unggul mahasiswa. Program studi pendidikan

umum dan karakter dapat memperkuat identitas kelembagaan terutama perguruan tinggi LPTK yang berstatus PTN BH. Penguatan karakter unggul mahasiswa dapat dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang mencakup *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*.

DAFTAR RUJUKAN

- Abi, A. R. (2017). Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 85-90.
- Ahmadi. (2015). Persepsi Mahasiswa pada Matakuliah Dasar Umum (MKDU). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(3), 38-51. <http://dx.doi.org/10.33087/jjubj.v15i3.148>
- Astawa, I. N. T. (2017). Memahami Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Kemajuan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjamin Mutu*, 3(2), 197-205. <http://dx.doi.org/10.25078/jpm.v3i2.200>
- Berkowitz, M. W. (2022). Implementing and Assessing Evidence-Based Character Education. *Journal of Education*, 202(2), 191-197. <https://doi.org/10.1177/00220574211026908>
- Cheung, A. B. L. (2012). Higher Education in Asia: Challenges from and Contributions to Globalization. *International Journal of Chinese Education*, 1(1), 177-195. <https://doi.org/10.1163%2F22125868-12340003>
- Dahliyana, A., Rizal, A. S., & Nurdin, E. S. (2020). Analisis Implementasi Pendidikan Karakter dalam Konteks Pendidikan Umum menurut Kajian Teori Kritis Jurgen Habermas. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 12(2), 91-99.
- Dewi, R. R., Suresman, E., & Mustikasari, L. (2020). Implementasi Kebijakan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi. *Eduksos: Jurnal Pendidikan Sosial Budaya*, 9(1), 1-15. <http://dx.doi.org/10.24235/edueksos.v9i1.6144>
- Dias, D., & Soares, D. (2017). Civic Learning Outcomes: A Step Towards an Inclusive Higher Education. *International Journal of Inclusive Education*, 22(4), 360-374. <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1365956>
- Faiz, A. (2020). Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 18(2), 1-7.
- Fajri, K. N. (2019). Proses Pengembangan Kurikulum. *Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 35-48. <https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.193>
- Gordon, G., & Whitchurch, C. (2007). Managing Human Resources in Higher Education: The Implications of a Diversifying Workforce. *Higher Education Management and Policy*, 19(2), 135-155.
- Harahap, R. D. S., Murdiono, M., & Siagian, L. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah sebagai Upaya Penguatan Karakter Demokratis Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 489-497.
- Hasanah. (2013). Implementasi Nilai-Nilai Karakter Inti di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(2), 186-195. <https://doi.org/10.21831/jpk.v2i2.1439>
- Hidayah, Y., Ulfah, N., & Suyitno. (2019). Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 22-33. <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v4.n1.2019.pp22-33>
- Jerome, L. (2012). Service Learning and Active Citizenship Education in England. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(1), 59-70. <https://doi.org/10.1177%2F1746197911432594>
- Kabatiah, M. (2021). Efektivitas Pengintegrasian Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi melalui Teknik Klarifikasi Nilai pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), 65-73. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i1.23730>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kurniawati & Nadeak, B. (2021). The Effect of Character Education and the Role of Teachers on the Competency of Students in Accounting and Finance Program SMKN 1 Toraja Utara. *Granthaalayah: International Journal of Research*, 9(2), 241-247. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i2.2021.3525>

- Lonto, A. L. (2019). Students' Civic Disposition through Learning Civics and Pedagogical Competences of High School Teachers. *Universal Journal of Educational Research*, 7(12), 35-41. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071905>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Naz, F., & Murad, H. S. (2017). Innovative Teaching has a Positive Impact on the Performance of Diverse Students. *Sage Open*, 7(4), 1-8. <https://doi.org/10.1177%2F2158244017734022>
- Paramita, G. V. (2010). Studi Kasus Perbedaan Karakteristik Mahasiswa di Universitas 'X' - Indonesia dengan Universitas 'Y' - Australia. *Humaniora*, 1(2), 629-635. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i2.2904>
- Pike, M. A., Hart, P., Paul, S. A. S., Lickona, T., & Clarke, P. (2020). Character Development through the Curriculum: Teaching and Assessing the Understanding and Practice of Virtue. *Journal of Curriculum Studies*, 1(1), 1-18.
- Purwanti, Rizal, A. S., & Nurdin, E. C. (2020). Konsep Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi dalam Tinjauan Esensialisme. *Sosio Religi: Jurnal Pendidikan Umum*, 18(2), 20-30.
- Raharja, R. M., Legiani, W. H., Sugiana, D. F., & Lestari, R. Y. (2017). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Warga Negara Mahasiswa FKIP Untirta. *Untirta Civic Education Journal*, 2(2), 199-213. <http://dx.doi.org/10.30870/ucej.v2i2.2812>
- Rahim, R. (2018). Urgensi Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU). *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 17-26.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676.
- Risda, D. (2022). Increasing Japanese and Indonesian Mutual Cooperation Indonesian Human Resources' Contribution to Japan's Technical Intern Training Program. *EconPapers*, 4(1), 79-143.
- Robby, S. K. I. (2020a). Analisis Konsep dan Kedudukan Mata Kuliah Wajib Umum Agama Islam dalam Perspektif Pendidikan Umum. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 363-369. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i4.2143>
- Robby, S. K. I. (2020b). Analisis Substansi Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama dalam Kerangka General Education. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 132-144. <https://doi.org/10.47281/fas.v1i2.14>
- Shih, Y. H. (2019). An Examination of the Functions of a General Education Art Curriculum in Universities. *Policy Futures in Education*, 17(3), 307-317. <https://doi.org/10.1177%2F1478210318811012>
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 142-157.
- Supriyanto, A. (2020). Model Pengembangan Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 17-23.
- Tyas, E. H., Sunatro, & Naibaho, L. (2020). Building Superior Human Resources through Character Education. *Engineering & Management*, 83(1), 11864-11873.
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Peserta Didik di dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Civics: Media Kajian*

- Kewarganegaraan*, 13(2), 188-198. <http://dx.doi.org/10.21831/civics.v13i2.12743>
- World Economic Forum. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Swiss: World Economic Forum .
- Yuniningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 84-93. <http://dx.doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>